

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah salah satu negara majemuk yang memiliki beragam suku, ras, bahasa dan agama serta kepercayaan tradisional atau adat istiadat. Kemajemukan ini tertuang dalam empat buah pilar NKRI yang mana saling berhubungan satu dengan yang lain. Gagasan ini tercetus dari ide Alm. Taufik Kemas saat menjabat sebagai Ketua MPR tahun 2009. Terkait empat pilar NKRI, Ketua Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat (dalam detikNews, 2013) mengatakan bahwa:

*"Disinilah muncul gagasan Empat Pilar berbangsa dan bernegara dari Ketua MPR, yang isinya menguraikan pentingnya menjaga NKRI dengan mengamalkan Pancasila agar kita tidak terperosok mengikuti jejak Uni Sovyet dan Yugoslavia, yang pecah menjadi berpuluh-puluh negara."*

Poin dari empat pilar tersebut ialah Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan juga semboyan bangsa negara "Bhinneka Tunggal Ika." Eddie Siregar (2012) mengatakan bahwa penyebutan empat pilar tersebut tidaklah dimaksudkan bahwa keempatnya memiliki kedudukan sederajat melainkan setiap poin tersebut memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Oleh karena Pancasila sebagai salah satu pilarnya yang merupakan ideologi dan dasar negara, maka pada prinsipnya tetap mengatasi tiga pilar yang lain.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki lima buah sila yang mana pada sila pertama menunjuk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama ini ditegaskan bahwa NKRI pertama-tama berlandaskan pada nilai Ketuhanan. Untuk menjamin agar setiap warga negara mendapatkan haknya terutama pada nilai Ketuhanan, pemerintah memberikan perlindungan dengan adanya pasal 29 tentang kebebasan beragama dalam UUD 1945 yang juga merupakan

salah satu dari empat pilar negara ini. Dalam ayat 1 dari pasal 29 UUD '45 berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Isi ayat pertama ini menegaskan bahwa negara berdasar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukan merupakan sebuah negara agama. Selanjutnya pada ayat kedua berbicara mengenai jaminan kebebasan bagi tiap-tiap warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sebelum adanya Keppres No. 6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) negara ini hanya mengakui 5 agama yang boleh dipeluk oleh masyarakatnya. Setelah adanya keputusan presiden tersebut, saat ini ada 6 agama yang diakui oleh negara yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keputusan ini juga diperkuat oleh SK Menteri Agama RI Nomor MA/12/2006 yang mana pemerintah menyatakan pengakuannya terhadap keberadaan Kong Hu Cu. Namun keputusan pemerintah berdasar Keppres No. 6/2000 dan SK Menteri Agama RI Nomor MA/12/2006 ini masih "menganak tirikan" penghayat kepercayaan lokal dalam setiap aspek kehidupan. Dalam administrasi kependudukan misalkan, sebelum adanya putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, masyarakat penghayat kepercayaan sulit mendapatkan hak-haknya seperti mencantumkan agama kepercayaan pada kolom kartu identitas seperti KTP, KK dan kartu identitas lain. Selain mencantumkan identitas agama kepercayaan pada kartu identitas, dalam hal yang lain mereka juga kesulitan untuk mendapatkan hak dalam pendidikan serta perkawinan. Setelah adanya putusan MK tersebut, hak-hak warga penghayat kepercayaan lokal lebih diterima dan bahkan secara hitam di atas putih, penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara.

Berlandaskan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, saat ini negara mengakui adanya 6 agama (Hindu, Katolik, Islam, Kristen, Budha dan Kong Hu Cu) serta beragam kepercayaan lokal. Beragam aliran kepercayaan tersebut seluruhnya ditampung dalam satu kepengurusan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Dalam hal ini MLKI merupakan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang

Maha Esa dan juga Komunitas Kepercayaan Adat. Fokus aktivitas wadah ini ialah advokasi, penguatan organisasi, peningkatan citra, pemberdayaan, peningkatan kerjasama, pengembangan jaringan dan peningkatan kontribusi (<https://www.mlki.or.id/>). Tercatat dalam data Kemendikbud tahun 2017 total ada 187 ragam aliran kepercayaan yang tersebar di Indonesia (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>). Ragam aliran kepercayaan yang ada di Indonesia beberapa diantaranya: Parmalim, Kejawen, Sunda Wiwitan, Agama Djawa Sunda, Kaharingan, Tonaas Walian, Islam Tua, Aluk Todolo, Marapu, Agama Bali (<http://www.kliknews.net/2017/11/08/ini-aliran-kepercayaan/>).

Bagi masyarakat bangsa ini terkhusus suku Jawa, kejawen merupakan satu dari sekian banyak kepercayaan lokal yang diketahui selain yang disebut di atas. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa kejawen merupakan segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (<https://kbbi.web.id>). Dalam banyaknya kegiatan masyarakat jawa, seluruh hal yang terkait dengan adat dan kepercayaan jawa maka akan disebut kejawen. Sebagai agama kepercayaan suku jawa, kejawen sendiri masih dapat dibagi dalam beberapa aliran menurut sejarah dan cara peribadatannya masing-masing antara lain: Kerohanian Sapta Darma (KSD), Paguyuban Rebo Wage, Ngesti Roso, Paguyuban Jawi Lugu, Budi Luhur dan masih banyak lagi.

Pada penelitian ini, aliran yang dipilih adalah penghayat KSD terkhusus di Surabaya. Berdasarkan pengambilan data awal melalui keterangan dari narasumber X yang sekaligus juga merupakan tokoh dari KSD dan juga Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pusat, KSD merupakan kelompok aliran kejawen yang banyak pengikut dan tersebar hingga mancanegara. KSD sendiri dalam proses ritual doa juga berbeda dengan kelompok aliran lain dan kekhasan yang lain bahwa KSD memiliki organisasi yang terstruktur dari Pusat (Yogyakarta) hingga pada level kelurahan. Menurut catatan pemerintah tahun 2010 ada sekitar 462 jiwa tercatat sebagai penganut kepercayaan lokal (bps.go.id ; 2010). KSD memulai pengembangan dengan keluar dari Pare tahun 1957 dengan

salah satunya masuk di Surabaya. Saat ini KSD wilayah Surabaya sudah memiliki lebih dari 30 sanggar (tempat ibadah) yang tersebar diberbagai penjuru kota. Pemilihan lokasi di Surabaya sendiri mengacu pada alasan bahwa narasumber yang sekaligus salah seorang tokoh lintas agama, berdomisili di Surabaya. Selain itu beberapa kali terdapat forum dialog lintas agama yang diikuti oleh warga KSD di Surabaya.

Merujuk pada sejarahnya, berdasarkan tulisan Sri Pawenang dalam Hadiwijono (2009) KSD didirikan oleh Hardjosapuro (tahun 1955 bergelar Sri Gutomo) di Pare-Kediri dan di wahyukan pada tanggal 27 Desember 1952. Beliau menerima beragam wahyu dari yang Kuasa yang kemudian menjadi ajaran dasar warga KSD. Wijayanti (2013) menjelaskan tiga dari ragam wahyu yang dimiliki oleh sapta darma, antara lain: a) *wewarah* tujuh yang merupakan poin-poin kewajiban warga KSD, b) simbol pribadi manusia yang menggambarkan asal dan sifat manusia, c) sujud yang merupakan cara untuk menyembah Yang Kuasa.

Berpatokan pada hasil pengambilan data awal dengan narasumber pertama, dalam kehidupannya terutama sikap dan perilaku, warga KSD diajak untuk memberi *pepadhang* bagi yang lain sesuai dengan wahyu yang terdapat dalam ajarannya. Contoh memberi *pepadhang* itu seperti mendoakan tetangga yang sakit atau dengan melakukan dialog dan silaturahmi. Kegiatan seperti mendoakan orang yang sakit diperkuat dengan pengalaman secara pribadi narasumber lain yang juga merupakan salah satu warga dan tokoh dari Sapta Darma. Beliau mengatakan bahwa ia pernah sakit dan sembuh dari sakitnya itu setelah didoakan oleh salah seorang warga Sapta Darma (sebelum menjadi warga Sapta Darma). Tidak berhenti di situ, suatu saat kedua anaknya sakit secara bersamaan. Ia lalu melakukan sujud untuk kesembuhan anaknya dan kemudian perlahan-lahan anaknya sembuh (pada saat itu sudah menjadi warga Sapta Darma). Dari pengalaman itu, narasumber kedua mengatakan bahwa dari situ ia lebih yakin dan mengimani terkait ajaran Sapta Darma itu sendiri tanpa memaksakan kehendak keluarga untuk mengikuti pilihannya.

Narasumber kedua ini juga menceritakan pengalamannya terkait aktivitas di lingkungan tempat tinggalnya baik bersama warga kampung maupun dengan sesama warga Sapta Darma. Dari aktivitas tersebut, beliau sama-sama memiliki posisi dalam dua kelompok berbeda. Di kampung sebagai seksi pembangunan LKMP (sudah dipegang beberapa periode) dan di Sapta Darma menjadi pengurus tingkat sanggar lokal. Dikisahkan bahwa ketika di kampung akan mendirikan mushola, ia ditolak oleh warga sekitar karena dianggap tidak pantas bahwa orang non muslim membangun mushola. Tetapi karena perannya sebagai pengurus, ia tetap menjalankan tugasnya. Bahkan hasil yang digunakan untuk proyek itu tidak memakan tabungan warga sekitar. Dengan kejadian tersebut, warga kemudian memuji narasumber kedua dan bahkan bersedia membantu pembangunan sanggar Sapta Darma di daerahnya.

Selain pengalaman akan peran individu dari warga Sapta Darma, pada bulan Mei 2019 ini sekelompok pemuda dari salah satu gereja katolik mengadakan *live in* di sanggar daerah Jemursari. Berdasarkan penuturan narasumber pertama dan juga sebagai penanggung jawab sanggar Jemursari, kegiatan tersebut sangat terbuka bahkan setiap warga Sapta Darma diajak untuk menerima sebagai satu saudara. Selain dari pemuda katolik, selang beberapa waktu, sekelompok kecil pastor juga mengadakan kunjungan dan diterima dengan terbuka. Bahkan pada malam tanggal 31 Mei, warga Sapta Darma diwakili oleh narasumber pertama mendapat undangan untuk melaksanakan sahur bersama di Gereja Katolik daerah Ngigel Surabaya.

Berbeda dari pengalaman yang mana terjalin kerukunan, dalam artikel Serikat Jurnalis untuk Keberagaman “Sapta Darma Melawan Diskriminasi” oleh Thowik (2017), menuliskan bagaimana perjuangan warga Sapta Darma melawan diskriminasi yang mereka terima dengan usaha-usaha yang juga dilakukan untuk melawan diskriminasi itu. Seperti dalam pendidikan, pihak Sapta Darma melakukan sanggaran bagi anak-anak dan remaja untuk memantapkan keyakinan mereka. Narasumber pertama juga menegaskan bahwa biasanya diskriminasi yang diterima ialah perijinan membangun tempat ibadah. Beliau mengatakan bahwa

kebanyakan halangan tersebut terjadi di perbatasan daerah Jawa Barat. Usaha utama untuk melawan diskriminasi tersebut dengan menggandeng perangkat daerah dan tokoh agama serta melakukan proses yang tidak melawan hukum.

Pengalaman tersebut dirangkum secara singkat oleh narasumber pertama dalam kegiatan sanggaran tanggal 31 Mei 2019 dengan mengangkat poin mengembangkan sumber daya manusia. Sebagai tokoh yang memiliki jabatan ditingkat nasional, beliau berpesan bahwa sumber daya setiap individu perlu ditingkatkan sesuai dengan kewajiban nomor tiga yang mana setiap warga diajak turut serta aktif dalam kehidupan bersama dengan lingkungannya. Ketika sumber daya tidak ditingkatkan, regenerasi tidak akan berjalan baik dan bahkan kendala-kendala yang lain seperti dipandang sebelah mata oleh agama lain juga kemungkinan terjadi kembali.

Fenomena dari pengalaman narasumber dan warga Sapta Darma secara umum tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah karena dalam pemaparannya ada pola-pola usaha atau dinamika yang dilakukan oleh mereka mulai dari melawan diskriminasi dengan tidak melanggar hukum bahkan sampai menyumbang usaha untuk kerukunan antar umat beragama. Lebih lanjut, bagaimana pola dinamika tersebut dimainkan hingga “dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat luas seperti dialog dengan mahasiswa hingga dalam melawan diskriminasi” menjadi salah satu poin dalam penelitian ini. Di sisi lain, bagaimana proses pengendalian serta pelaksanaan nilai ajaran Sapta Darma dapat menjadi bagian dalam hidup para warganya disamping adanya harapan dari masyarakat umum bagi para warga KSD merupakan poin lain yang dapat dikaji secara ilmiah.

Merujuk pada salah satu wahyu yang merupakan kewajiban setiap warga KSD yaitu *wewarah* tujuh terutama poin ketiga, setiap warga diajak berperan dalam kehidupan sehari-hari terutama juga dalam bermasyarakat. Dijabarkan sebelumnya oleh narasumber di atas bahwa setiap warga diajak untuk memberi *pepadhang* atau menjadi penerang. Ajakan yang terkait kewajiban setiap warga, merupakan

salah satu cara warga KSD untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat seperti tolong menolong kepada yang membutuhkan.

Dengan demikian, maka setiap penghayat KSD berkewajiban untuk turut aktif dalam hidup bermasyarakat. Sejalan dengan salah satu teori sosial terutama dalam ilmu psikologi, maka hal tersebut berkaitan dengan teori peran. Teori peran sendiri adalah sebuah teori yang menekankan bahwa perilaku individu dalam menjalankan posisi yang diperankan dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya ialah harapan yang dikehendaki secara umum oleh masyarakat sekitarnya. Perspektif belajar dalam psikologi menekankan cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi berbagai perilaku manusia dan hewan, mencakup behaviorisme dan teori-teori belajar sosial kognitif (dalam Wade, 2011). Kesenjangan dari sudut pandang psikologi dengan teori peran sendiri ialah penekanan tentang perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti harapan dari lingkungan sekitar menurut teori peran sendiri, maupun dari cara belajar individu menurut perspektif belajar. Terkait dengan subjek penghayat Sapta Darma, dikajinya melalui teori peran untuk lebih memahami bagaimana proses tersebut dijalankan serta melihat alur dalam proses memahami peran tersebut. Anggapan ini dikarenakan dalam peran sendiri yang paling menarik ialah aspek perilaku dalam kehidupan sosial yang dilalui individu.

Salah satu contoh yang menarik terkait peran ialah bagaimana seorang individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di sekitarnya (dalam Suhardono, 1994). Poin ini menjadi menarik jika merujuk pada contoh sebelumnya, bagaimana sikap perilaku individu terutama dalam hal ini penghayat Sapta Darma ketika mendapat diskriminasi tetap berusaha berjuang dan tetap menjadi *pepadhang* bagi sesama. Di sisi lain, bagaimana usaha-usaha yang dijalankan juga dapat memberikan kekuatan bagi individu itu sendiri untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang sesuai dengan apa yang dimiliki dan sejalan dengan nilai dan norma umum dalam masyarakat. Dengan dikaji melalui dinamika peran, maka usaha untuk melihat kekuatan individu dalam berperilaku dapat semakin nampak dan dapat memudahkan individu atau kelompok subjek

dalam menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat sekitar. Sudut pandang ini diperkuat dengan teori motivasi dalam ilmu psikologi yang mana merujuk pada suatu proses dalam diri manusia dan hewan yang menyebabkan organisme tersebut bergerak menuju suatu tujuan, atau bergerak menjauh dari situasi yang tidak menyenangkan (dalam Wade, 2012). Usaha yang dilakukan oleh warga Sapta Darma dari pengalaman yang dijabarkan sebelumnya muncul akibat adanya suatu motif. Motif yang menjadi pendorong ialah salah satu dari kewajiban warga Sapta Darma sendiri.

Berdasarkan sejarahnya, Sarwono (2008) memberi pengantar bahwa teori ini diambil dari dunia teater yang mengadopsi istilah “peran” yang dimainkan oleh seorang actor. Dalam teater, seorang actor harus bermain sesuai dengan karakter tokoh yang dimainkannya. Lebih rinci lagi, ditekankan oleh Sarwono (2008) bahwa peran seorang aktor teater yang kemudian dianalogikan sebagai peran seorang individu dalam masyarakat mengulas terkait perilaku yang diharapkan dari setiap individu tidak hanya berdiri sendiri melainkan selalu terkait dengan orang lain yang berhubungan dengannya. Sejalan dengan konsep sebelumnya, dalam catatan dari Shaw dan Costanzo (1982), sejarah teori ini diambil dari jaman Yunani dan Romawi yang mana dalam dunia teater, seorang aktor dipanggil untuk memerankan suatu karakter dari tokoh yang dimainkan. Masih dalam catatannya, perubahan makna peran terkait konteks ilmu sosial merujuk pada fungsi seseorang ketika berperilaku pada posisi atau karakteristik dalam konteks dunia sosial.

Dalam fungsi perannya, seseorang dihadapkan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan perannya. Menurut Biddle dan Thomas (1966 dalam Sarwono, 2008) ada *lima* aspek yang berkaitan dalam peran: a) harapan, merujuk pada harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang sebaiknya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu; b) norma, merujuk pada bentuk-bentuk dari harapan; c) wujud perilaku, mengacu pada bagaimana perilaku itu nyata diperankan oleh setiap individu sebagai aktor; d) penilaian dan sanksi, mengacu pada kesan yang didapat terkait perilaku peran yang dijalankan individu.

Digunakannya teori peran dalam kajian fenomena penelitian ini karena peneliti ingin melihat proses yang dilakukan oleh warga sapta darma terutama dalam peran-peran yang dimainkan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain. Ide ini berdasar dari pemikiran Sarwono (2008) yang telah dipaparkan sebelumnya dalam mengulas sejarah teori ini. Dalam hidup sosial bermasyarakat, setiap orang memiliki perannya masing-masing seperti halnya seorang seniman aktor dalam dunia sandiwara. Dalam prosesnya terutama dengan menggunakan teori peran, perilaku yang timbul dari setiap individu pasti saling terkait dengan apa yang diharapkan oleh pihak eksternal. Dalam hal ini dapat berupa masyarakat maupun sesama warga Sapta Darma. Oleh karenanya, bagaimana proses peran dalam menjalin hubungan tersebut dilakukan menarik dikaji dengan teori peran sesuai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam menunjang kekhasan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan kekhasan penelitian yang dibuat. Penelitian pertama mengambil milik Anshori (2013) dengan judul penelitian skripsi terkait “Laku Spiritual Penganut Ajaran Kerokhaniaan “Sapta Darma” (Kasus Sanggar Candi Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang).” Hasil dari penelitian tersebut menitik beratkan pada adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam melakukan laku spiritual kepercayaan Sapta Darma. Lebih lanjut, kedua faktor tersebut terkait dengan kehidupan pribadi dan bermasyarakat dari warga yang menganut kepercayaan tersebut.

Penelitian kedua mengambil milik Aziz (2017) dengan judul skripsi “Konstruksi Sosial Penghayat Kerohanian Sapta Darma (KSD) Terhadap Ajaran KSD Dalam Kehidupan Sosial (Studi Di Sanggar Agung Candi Busana Sapta Darma Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).” Hasil yang didapatkan pada penelitian kedua ini ialah terkait pada bagaimana cara mengkonstruksi ajaran Sapta Darma dalam kehidupan sosial. Ragam konstruksi tersebut diproses dengan perilaku tolong menolong, bersikap ikhlas dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Inti dari fokus kekhasan kedua penelitian diatas adalah bagaimana laku spiritual serta laku ritual dilakukan

oleh penganut aliran tersebut dan juga faktor apa yang mempengaruhi eksistensinya baik dilihat dari faktor pendorong maupun penghambat serta penjelasan mengenai konstruksi penghayat KSD terhadap ajaran KSD dalam kehidupan sosial dan juga pengetahuan akan kondisi religiusitas penghayat KSD yang dilakukan dalam kepercayaan yang dianut.

Bertolak belakang terkait fokus dengan kedua penelitian di atas, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana dinamika peran warga KSD ditinjau dari ajarannya menggunakan teori peran dalam konteks kajian psikologi. Peneliti tidak sekedar mengupas perihal perilaku yang dilakukan oleh warga KSD melainkan juga melihat bagaimana proses dan cara warga KSD dalam menjalankan perannya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk mengkaji secara ilmiah dinamika peran warga KSD dalam bermasyarakat. Dinamika peran sendiri secara singkat dapat dijelaskan sebagai pola perubahan perilaku individu yang saling terkait dengan lingkungan sekitarnya. Partisipan dalam penelitian ini ialah warga KSD sendiri baik yang menjabat sebagai pengurus maupun yang bukan pengurus.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji secara ilmiah dinamika peran warga KSD dalam bermasyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah menyumbang gagasan ilmiah pada aspek ilmu psikologi sosial terutama pada konteks dinamika peran.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### **a) Bagi peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti terkait dinamika peran pada penghayat

KSD sehingga mendapat gambaran bagaimana proses dinamika peran tersebut dimainkan atau dijalankan oleh penghayat Sapta Darma.

b) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan menambah wawasan terkait kajian teori pada dinamika sosial dalam sudut pandang psikologi sosial. Di sisi lain, bagi masyarakat Sapta Darma secara khusus dapat memberikan sudut pandang dalam menunjukkan usaha-usaha apa yang dapat dilakukan agar ada kesesuaian dengan masyarakat pada umumnya.